

PENGARUH PENGENDALIAN INTERNAL, AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI TERHADAP KINERJA PEMERINTAH PADA OPD KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

RANTI MELASARI¹

Universitas Islam Indragiri

E-mail: ranti.akuntansiunisi@gmail.com

ROSLIANA²

Universitas Islam Indragiri

E-mail: r.roslianarusdi@gmail.com

PENI SILVIONITA³

Universitas Islam Indragiri

E-mail: penisilvi@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to obtain empirical evidence of the effect of internal control, accountability and transparency on government performance in the OPD of Indragiri Hilir Regency. The population in this study were all 34 OPD in Indragiri Hilir District. The method for selecting the sample used a purposive sampling method, with a total sample of 56 respondents who filled out the research questionnaire. The analysis technique used is multiple linear regression. The results of the study show that internal control affects government performance, accountability influences government performance and transparency influences government performance. Simultaneous test results show that internal control, accountability and transparency affect government performance in the OPD of Indragiri Hilir Regency.

Keywords: *Government Performance, Internal Control, Accountability, Transparency*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan mendapatkan bukti empiris pengaruh pengendalian internal, akuntabilitas dan transparansi terhadap kinerja pemerintah pada OPD Kabupaten Indragiri Hilir. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh OPD yang berjumlah 34 OPD di Kabupaten Indragiri Hilir. Metode dalam pemilihan sampel menggunakan metode *purposive sampling*, dengan total sampel yang mengisi kuesioner penelitian yaitu sebanyak 56 responden. Teknik analisa yang digunakan adalah regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengendalian internal berpengaruh terhadap kinerja pemerintah, akuntabilitas berpengaruh terhadap kinerja pemerintah serta transparansi berpengaruh terhadap kinerja pemerintah. Hasil uji simultan menunjukkan bahwa pengendalian internal, akuntabilitas dan transparansi berpengaruh terhadap kinerja pemerintah pada OPD Kabupaten Indragiri Hilir.

Kata Kunci: *Kinerja Pemerintah, Pengendalian Internal, Akuntabilitas, Transparansi.*

1. PENDAHULUAN

Pemerintah merupakan sekelompok orang yang diberikan kepercayaan oleh masyarakat untuk menjalankan roda pemerintahan di suatu negara. Dalam rangka peningkatan pelayanan serta kesejahteraan masyarakat, dipandang perlu adanya pembagian kekuasaan antara pemerintah pusat maupun pemerintah daerah yang diwujudkan dalam bentuk otonomi daerah. Pemerintah daerah selain bersifat otonom, juga merupakan organisasi sektor publik yang bersifat non-profit. Dikarenakan sifat non-profit tersebut, keberhasilan sebuah organisasi sektor publik juga harus diukur dari kinerjanya (Almanda, 2012 dalam Jatmiko, 2020).

Tuntutan akan kinerja yang baik selalu terjadi hampir disemua pemerintahan seiring dengan terbitnya otonomi daerah dan penetapan dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pengelolaan pemerintah. Kinerja pemerintah harus diinformasikan kepada para pemangku kepentingan dan masyarakat mengenai tingkat pencapaian hasil kerja, yang dikaitkan dengan misi dan visi suatu organisasi (Damayati dan Hermanto, 2018)

Salah satu bentuk dari tata pemerintahan yang baik dapat dilihat dari hasil opini audit pada laporan keuangan. Hasil opini audit pada Laporan Keuangan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir pada tahun 2016 s.d 2020 yaitu Wajar Tanpa Pengecualian, sedangkan opini audit pada 2015 adalah Wajar Dengan Pengecualian. Hal tersebut merupakan suatu perkembangan yang baik. Meskipun demikian, di dalam Surat Resmi dari Badan

Melasari-Roslina-Silvionita, Pengaruh Pengendalian Internal, Akuntabilitas Dan Transparansi Terhadap Kinerja Pemerintah Pada OPD Kabupaten Indragiri Hilir

Pemeriksaan Keuangan Perwakilan Provinsi Riau yang ditujukan kepada Bupati Indragiri Hilir mulai tahun 2017 sampai dengan 2020, juga disebutkan adanya pokok-pokok hasil pemeriksaan lainnya yang harus menjadi bahan perbaikan untuk seterusnya. Pokok permasalahan yang terus menerus muncul mulai tahun 2017 sampai dengan 2020 adalah kelemahan pada sistem pengendalian internal dalam penyusunan laporan keuangan. Akuntabilitas dan transparansi yang baik tercermin dari sistem pengendalian internal yang baik pula.

Menurut Peraturan Pemerintah No.60 Tahun 2008 sistem pengendalian intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Suatu instansi pemerintah umumnya menggunakan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) untuk mengarahkan operasi kinerja instansi dan mencegah terjadinya kesalahan sistem. Sistem pengendalian intern yang baik dalam suatu instansi akan mampu menciptakan keseluruhan proses kegiatan yang prima. Hal tersebut akan memberikan keyakinan bagi instansi bahwa kegiatan yang dilakukan telah mengikuti prinsip efektivitas dan efisiensi, dan hal ini akan berdampak positif pada kinerja instansi.

Menurut Rusdiana dan Nasihudin (2018) akuntabilitas adalah pertanggungjawaban dari seseorang atau sekelompok orang yang diberi amanat untuk menjalankan tugas tertentu kepada pihak pemberi amanat baik secara vertikal maupun horizontal. Temalagi, dkk (2021) menyatakan bahwa akuntabilitas bila dikaitkan dengan organisasi pemerintah, dapat diartikan sebagai penyediaan informasi tentang kegiatan dan kinerja pemerintah kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Pemerintah baik pusat maupun daerah harus mampu menjadi subjek pemberi informasi dalam rangka pemenuhan hak publik. Menurut Saputra, dkk (2014) dengan adanya akuntabilitas publik, pemerintah daerah bisa memberikan pertanggungjawaban atas semua kegiatan yang dilaksanakan sehingga kinerja pemerintah daerah dapat dinilai baik oleh pihak internal, maupun pihak eksternal. Hal ini menegaskan pentingnya akuntabilitas publik dalam peningkatan kinerja pemerintah

Transparansi menurut Damayanti dan Hermanto (2018) adalah keterbukaan informasi dalam penyelenggaraan pemerintah yang merupakan salah satu wujud komitmen pemerintah dalam melaksanakan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik sehingga menciptakan pemerintahan yang bersih dan akuntabel. Dengan adanya transparansi, kondisi akhir yang diharapkan yaitu timbulnya kepercayaan publik terhadap pemerintah sehingga berujung pada tingkat penilaian kinerja pemerintah yang baik pula.

Untuk memenuhi prinsip transparansi dan akuntabilitas, informasi yang tercantum dalam laporan keuangan pemerintah daerah tidak hanya dilaporkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), tetapi juga kepada masyarakat. Artinya pemerintah daerah harus meningkatkan aksesibilitas laporan keuangannya dengan memfasilitasi masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan laporan keuangan dengan mudah (Aliyah dan Nahar, 2012)

Teori *stewardship* menjelaskan hubungan pengendalian internal, akuntabilitas dan transparansi dalam kinerja pemerintah yang merupakan suatu keadaan dimana manajer sebagai *steward* lebih berfokus pada kepentingan bersama atau tujuan organisasi bukan pada kepentingan pribadi. Dalam teori *stewardship* pemerintah berperan sebagai *steward* berperan untuk memberikan pelayanan bagi kepentingan *principal*, yaitu dalam hal ini adalah masyarakat. Akuntabilitas dan transparansi merupakan upaya untuk menciptakan tata pemerintahan yang baik, sedangkan untuk membantu proses implementasi dari kedua faktor tersebut didukung oleh adanya kontrol atau pengendalian salah satunya berasal dari dalam instansi atau disebut juga pengendalian internal. Pengendalian internal, akuntabilitas, dan transparansi secara bersama-sama dapat mencerminkan gambaran atau bagaimana kinerja dari sebuah organisasi, dalam penelitian ini yaitu pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang berada di Kabupaten Indragiri Hilir

Penelitian yang dilakukan oleh Damayanti dan Hermanto (2018) menunjukkan bahwa akuntabilitas, transparansi dan pengendalian internal berpengaruh terhadap kinerja pemerintah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Surabaya. Sedangkan penelitian Haris, dkk (2022) menunjukkan bahwa transparansi tidak berpengaruh terhadap kinerja pemerintah. Penelitian Putra, dkk (2022) juga menunjukkan bahwa akuntabilitas dan sistem pengendalian internal tidak berpengaruh terhadap kinerja pemerintah. Instansi dianggap belum efektif dalam menampung aspirasi masyarakat dan menjalankan program-program yang direncanakan. Selain itu dalam instansi belum terdapat pemisahan tugas yang jelas dari instansi ke pegawainya sehingga terjadi tumpang tindih dalam bekerja

Berdasarkan latar belakang diatas dan perbedaan hasil penelitian maka dipandang perlu adanya penelitian mengenai bagaimana pengaruh dari pengendalian internal, akuntabilitas, dan transparansi baik secara parsial (individu) maupun simultan (bersama-sama) terhadap kinerja pemerintah pada Organisasi Perangkat Daerah yang bertempat di Kabupaten Indragiri Hilir.

Melasari-Rosliana-Silvionita, Pengaruh Pengendalian Internal, Akuntabilitas Dan Transparansi Terhadap Kinerja Pemerintah Pada OPD Kabupaten Indragiri Hilir

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Teori *Stewardship*

Teori *stewardship* merupakan suatu keadaan dimana manajer sebagai *steward* lebih berfokus pada kepentingan bersama atau tujuan organisasi bukan pada kepentingan pribadi (Jannah, 2016). Dalam hal ini yang menjadi *steward* adalah Pemerintah yang berperan sebagai pengelola sumber daya, sedangkan yang menjadi *prinsipal* adalah masyarakat sebagai pemilik dari sumber daya tersebut.

Teori *stewardship* mengedepankan pandangan bahwa individu, dan ini termasuk direktur, seringkali dapat dimotivasi oleh pertimbangan keadilan, keadilan dan kepedulian terhadap kepentingan orang dan direktur sering melihat diri mereka sebagai pelayan urusan perusahaan yang dapat dipercaya untuk melakukan pekerjaan yang baik dan profesional, dan mereka sangat terhubung dengan tujuan perusahaan sehingga tujuan tersebut lebih diutamakan daripada kepentingan pribadi mereka (Keay, 2017)

2.2 Kinerja Pemerintah

Menurut Haris, dkk (2022) istilah kinerja berasal dari kata *performance* yang artinya *Manner Of Functioning*, artinya sejauh mana atau bagaimana suatu organisasi ataupun individu berfungsi sesuai dengan posisi dan atau tugasnya. Organisasi sektor publik memiliki tugas utama menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat. Peraturan Pemerintah No. 29 tahun 2014 mendefinisikan kinerja adalah keluaran atau hasil dari kegiatan atau program yang telah atau hendak dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur

Untuk mengetahui tingkat keberhasilan kinerja disuatu instansi pemerintah, maka seluruh aktivitas sumber daya baik secara finansial maupun non finansial harus dapat diukur dan pengukuran tersebut semata-mata tidak hanya bergantung pada *input* (masukan) dari kegiatan/program tersebut tetapi pengukuran tersebut lebih menekankan pada *output* (keluaran) yang diharapkan dapat dicapai dari suatu kegiatan (Damayanti dan Hermanto, 2018)

2.3 Pengendalian Internal

Menurut COSO (*Committee of Sponsoring Organization*) (2013) pengendalian internal adalah suatu proses, dijalankan oleh dewan komisaris, manajemen, dan karyawan lain dari suatu entitas, dirancang untuk memberikan jaminan memadai sehubungan dengan pencapaian tujuan dalam kategori sebagai berikut: keandalan pelaporan keuangan, kepatuhan terhadap undang-undang dan peraturan yang berlaku, efektivitas dan efisiensi operasional. Adapun fungsi pengendalian internal menurut Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara (2012) yaitu: a) *preventive*; b) *detective*; c) *corrective*; d) *directive*; dan e) *compensative*.

2.4 Akuntabilitas

Akuntabilitas merujuk pada hubungan otoritatif dimana seseorang diberi hak resmi untuk menuntut penjelasan orang lain yaitu memberi penjelasan tentang tindakannya; *reward* atau hukuman diberikan pada pihak kedua yang tergantung pada apakah tindakan itu sesuai dengan keinginan pihak pertama (Raba, 2020). Menurut Rusdiana dan Nasihudin (2018), adapun faktor-faktor yang menyebabkan pentingnya akuntabilitas dijalankan yaitu tekanan fiskal, tekanan kualitas, dan tekanan perubahan. Menurut Syahrudin Rasul (2002) dalam Rusdiana dan Nasihudin (2018), ada 5 jenis dari akuntabilitas publik yaitu a) akuntabilitas hukum dan kejujuran; b) akuntabilitas manajerial; c) akuntabilitas program; d) akuntabilitas kebijakan; e) akuntabilitas finansial.

2.5 Transparansi

Transparansi mengacu pada keterbukaan informasi sebagai kunci tata kelola yang lebih baik. Hal ini secara luas dilihat sebagai prasyarat untuk akuntabilitas demokratis dari semua jenis pekerja yang berkuasa. Menurut Damayanti dan Hermanto (2018) transparansi adalah keterbukaan informasi dalam penyelenggaraan pemerintah yang merupakan salah satu wujud komitmen pemerintah dalam melaksanakan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik sehingga menciptakan pemerintahan yang bersih dan akuntabel.

Transparansi dalam pemerintahan daerah mensyaratkan adanya keterbukaan dari pemerintah daerah itu sendiri dalam proses pengambilan keputusan, kebijakan, atau pembuatan laporan – pelaporan hasil kerjanya, sehingga masyarakat dapat mengetahui, menganalisa, dan memberikan masukan serta mengawasi jalannya pemerintahan daerah. Transparansi pada akhirnya dapat menciptakan akuntabilitas horizontal antara pemerintah dan masyarakat, sehingga muncul *good governance* di tingkat daerah (Sumartono dan Pasolo, 2019)

Melasari-Rosliana-Silvionita, Pengaruh Pengendalian Internal, Akuntabilitas Dan Transparansi Terhadap Kinerja Pemerintah Pada OPD Kabupaten Indragiri Hilir

2.6 Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kinerja Pemerintah

Menurut Temalagi, dkk (2022) pengendalian intern adalah rangkaian kegiatan untuk memastikan bahwa pengelolaan anggaran telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan telah dilaksanakan dengan prinsip *value for money*. Semakin banyak pengendalian intern yang dilakukan maka akan meminimalisir terjadinya penyimpangan, kecurangan, dan kesalahan sehingga kinerja akan meningkat. Sistem pengendalian intern yang baik dalam suatu instansi akan mampu menciptakan keseluruhan proses kegiatan yang prima. Hal tersebut akan memberikan keyakinan bagi instansi bahwa kegiatan yang dilakukan telah mengikuti prinsip efektivitas dan efisiensi, dan hal ini akan berdampak positif pada kinerja instansi.

H1 : Pengendalian internal berpengaruh terhadap kinerja pemerintah pada OPD Kabupaten Indragiri Hilir

2.7 Pengaruh Akuntabilitas Terhadap Kinerja Pemerintah

Menurut Saputra, dkk (2014) dengan adanya akuntabilitas publik, pemerintah daerah bisa memberikan pertanggungjawaban atas semua kegiatan yang dilaksanakan sehingga kinerja pemerintah daerah dapat dinilai baik oleh pihak internal, maupun pihak eksternal. Hal ini menegaskan pentingnya akuntabilitas publik dalam peningkatan kinerja pemerintah. Damayanti dan Hermanto (2018) menyatakan bahwa setiap instansi pemerintah dituntut untuk mempertanggungjawabkan laporan keuangan dan laporan kinerja dengan cara mampu menyajikan dan menjelaskan seluruh hasil dari program atau kegiatan yang telah dilaksanakan sehingga semua pihak yang berkepentingan dapat menilai apakah pemerintah telah melaksanakan kinerjanya secara ekonomis, efisien, dan efektif.

H2 : Akuntabilitas berpengaruh terhadap kinerja pemerintah pada OPD Kabupaten Indragiri Hilir

2.8 Pengaruh Transparansi Terhadap Kinerja Pemerintah

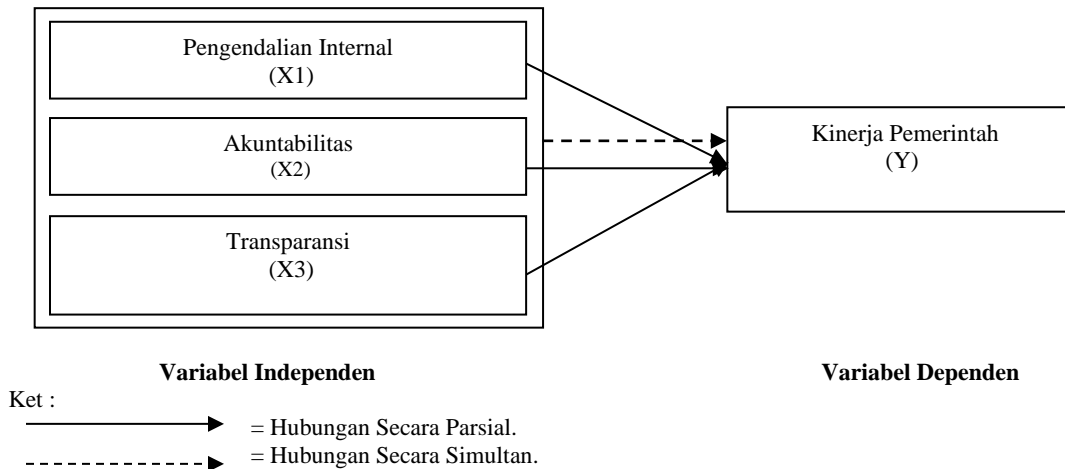
Dengan adanya transparansi, kondisi akhir yang diharapkan yaitu timbulnya kepercayaan publik terhadap pemerintah sehingga berujung pada tingkat penilaian kinerja pemerintah yang baik pula. Menurut Haris, dkk (2022) transparansi berarti keterbukaan pemerintah daerah dalam memberikan informasi terkait dengan aktivitas pengelolaan keuangan daerah kepada para pemangku kepentingan. Penerapan transparansi merupakan bukti keseriusan pemerintah dalam menjalankan pemerintah yang bersih, jujur dan bebas dari segala bentuk penyimpangan yang berarti dapat meningkatkan kinerja pemerintah daerah.

H3 : Transparansi berpengaruh terhadap Kinerja pemerintah pada OPD Kabupaten Indragiri Hilir

H4 : Pengendalian internal, akuntabilitas dan transparansi berpengaruh terhadap kinerja pemerintah pada OPD Kabupaten Indragiri Hilir

2.9 Kerangka Pemikiran

Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran



Melasari-Rosliana-Silvionita, Pengaruh Pengendalian Internal, Akuntabilitas Dan Transparansi Terhadap Kinerja Pemerintah Pada OPD Kabupaten Indragiri Hilir

3. METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Rancangan Penelitian

Rancangan yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian kausal komparatif. Penelitian kausal komparatif (*causal comparative research*) yang disebut juga sebagai penelitian *ex post facto* adalah penyelidikan empiris yang sistematis dimana ilmuwan mengendalikan variabel bebas secara langsung karena eksistensi dari variabel-variabel tersebut telah terjadi, atau karena variabel tersebut pada dasarnya tidak dapat di manipulasi (Emzir, 2010).

3.2 Tempat dan Waktu Penelitian

Tempat penelitian dilakukan di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Indragiri Hilir (diluar Kecamatan). Adapun waktu penelitian yaitu selama 3 (tiga) bulan mulai dari bulan Maret sampai dengan Mei 2022.

3.3 Populasi dan Sampel

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dengan total 34 OPD. Sedangkan untuk sampel, penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling*. Menurut Sugiyono (2018), *purposive sampling* adalah teknik penentuan sampel dengan berbagai pertimbangan tertentu. Kriteria pengambilan sampel pada penelitian ini yaitu sebagai berikut.

1. Pegawai dibidang keuangan pada Organisasi Perangkat Daerah.
2. Pegawai yang bekerja minimal 1 tahun.
3. Pegawai yang memiliki pendidikan minimal SLTA/ sederajat.

3.4 Prosedur Pengumpulan Data

Adapun metode pengumpulan data yang di gunakan yaitu metode kuesioner. Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh langsung dari *survey* dengan memberikan kuesioner kepada sampel yang memenuhi kriteria. Kuesioner yang digunakan oleh peneliti merupakan angket yang bersifat tertutup.

3.5 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

1. Variabel Independen

a. Pengendalian Internal (X_1)

Pengendalian internal menurut COSO (*Committee of Sponsoring Organization*) (2013) pengendalian internal adalah suatu proses, dijalankan oleh dewan komisaris, manajemen, dan karyawan lain dari suatu entitas, dirancang untuk memberikan jaminan memadai sehubungan dengan pencapaian tujuan dalam kategori sebagai berikut: keandalan pelaporan keuangan, kepatuhan terhadap undang-undang dan peraturan yang berlaku, efektivitas dan efisiensi operasional. Variabel pengendalian internal menggunakan 12 pertanyaan yang direplikasi dari Amri (2019). Adapun indikator pengukuran yang digunakan pada variabel pengendalian internal ada 5 item yaitu lingkungan pengendalian, penilaian risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, pemantauan. Pengukuran variabel ini menggunakan 5 (lima) skala likert

b. Akuntabilitas (X_2)

Akuntabilitas menurut Rusdiana & Nasihudin (2018) adalah pertanggungjawaban dari seseorang atau sekelompok orang yang diberi amanat untuk menjalankan tugas tertentu kepada pihak pemberi amanat baik secara vertikal maupun horizontal. Variabel akuntabilitas menggunakan 9 pertanyaan yang direplikasi dari Damayanti dan Hermanto (2018). Adapun indikator pengukuran yang digunakan pada variabel akuntabilitas ada 7 item yaitu pertanggungjawaban lembaga publik, penyusunan laporan pertanggungjawaban kinerja, ketercapaian tujuan, pertanggungjawaban program, tujuan pembuatan kebijakan, kesesuaian laporan dengan sistem akuntansi pemerintah, laporan yang dibuat dapat dibandingkan. Pengukuran variabel ini menggunakan 5 (lima) skala likert.

c. Transparansi (X_3)

Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara (2012), mengemukakan bahwa transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan suatu lembaga atau perorangan, seperti keuangan, program, penerima manfaat, dan lain-lain. Variabel transparansi menggunakan 10 item pertanyaan dengan yang dikembangkan dari Sumanto (2021). Adapun indikator pengukuran yang digunakan pada variabel transparansi ada 3 item yaitu keterbukaan, aksesibilitas dan publikasi. Pengukuran variabel ini menggunakan 5 (lima) skala likert.

Melasari-Roslina-Silvionita, Pengaruh Pengendalian Internal, Akuntabilitas Dan Transparansi Terhadap Kinerja Pemerintah Pada OPD Kabupaten Indragiri Hilir

2. Variabel Dependen

a. Kinerja Pemerintah (Y)

Peraturan Pemerintah No. 29 tahun 2014 mendefinisikan kinerja adalah keluaran atau hasil dari kegiatan atau program yang telah atau hendak dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur. Variabel pengendalian internal menggunakan 6 pertanyaan yang direplikasi dari Amri (2019). Adapun indikator pengukuran yang digunakan pada variabel kinerja pemerintah ada 3 item yaitu kinerja pegawai, kinerja manajemen, kinerja instansi. Pengukuran variabel ini menggunakan 5 (lima) skala likert.

3.6 Teknik Analisis Data

Sesuai dengan rumusan masalah, tujuan penelitian dan hipotesis, maka penelitian ini menggunakan metode regresi linier berganda antara variabel dependen dalam hal ini adalah kinerja pemerintah, dengan variabel akuntabilitas, pengendalian internal, dan transparansi menggunakan SPSS Versi 26.

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

1. Statistik Deskriptif

Tabel 4.1
Statistik Deskriptif
Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Akuntabilitas	56	32	45	39.18	2,955
Pengendalian_Internal	56	38	60	51.07	5,183
Transparansi	56	32	48	40.98	4,228
Kinerja_Pemerintah	56	21	30	25.59	2,294
Valid N (listwise)	56				

Sumber : *Data Olahan SPSS Versi 26, 2022*

Dari tabel 4.1 diatas, dapat diketahui bahwa jumlah responden (N) yang diolah dalam penelitian ini berjumlah 56 (lima puluh enam) responden. Variabel akuntabilitas (X1) memiliki nilai minimum sebesar 32, sedangkan nilai maksimal 45, dengan nilai rata rata sebesar 39,18 dan standar deviasi sebesar 2,955. Variabel Pengendalian Internal (X2) memiliki nilai minimum sebesar 38, sedangkan nilai maksimal 60, dengan nilai rata rata sebesar 51,07 dan standar deviasi sebesar 5,183. Variabel Transparansi (X3) memiliki nilai minimum sebesar 32, sedangkan nilai maksimal 48, dengan nilai rata rata sebesar 40,98 dan standar deviasi sebesar 4,228. Variabel Kinerja Pemerintah (Y) memiliki nilai minimum sebesar 21, sedangkan nilai maksimal 30, dengan nilai rata rata sebesar 25,59 dan standar deviasi 2,294.

2. Uji Kualitas Data

a. Uji Validitas

Tabel 4.2
Hasil Uji Validitas Pengendalian Internal (X₁)

Item Pertanyaan	R Hitung	R Tabel	Ket
1	0,675	0,2632	Valid
2	0,596	0,2632	Valid
3	0,760	0,2632	Valid
4	0,594	0,2632	Valid
5	0,692	0,2632	Valid
6	0,593	0,2632	Valid
7	0,549	0,2632	Valid
8	0,697	0,2632	Valid
9	0,549	0,2632	Valid
10	0,601	0,2632	Valid
11	0,428	0,2632	Valid
12	0,504	0,2632	Valid

Sumber : *Data Olahan SPSS Versi 26, 2022*

Tabel 4.3
Hasil Uji Validitas Akuntabilitas (X₂)

Item Pertanyaan	R Hitung	R Tabel	Ket
1	0,697	0,2632	Valid
2	0,670	0,2632	Valid
3	0,506	0,2632	Valid
4	0,646	0,2632	Valid
5	0,397	0,2632	Valid
6	0,694	0,2632	Valid
7	0,751	0,2632	Valid
8	0,473	0,2632	Valid
9	0,627	0,2632	Valid

Sumber : Data Olahan SPSS Versi 26, 2022

Tabel 4.4
Hasil Uji Validitas Transparansi (X₃)

Item Pertanyaan	R Hitung	R Tabel	Ket
1	0,702	0,2632	Valid
2	0,565	0,2632	Valid
3	0,564	0,2632	Valid
4	0,680	0,2632	Valid
5	0,486	0,2632	Valid
6	0,592	0,2632	Valid
7	0,612	0,2632	Valid
8	0,430	0,2632	Valid
9	0,674	0,2632	Valid
10	0,647	0,2632	Valid

Sumber : Data Olahan SPSS Versi 26, 2022

Tabel 4.5
Hasil Uji Validitas Kinerja Pemerintah (Y)

Item Pertanyaan	R Hitung	R Tabel	Ket
1	0,776	0,2632	Valid
2	0,649	0,2632	Valid
3	0,694	0,2632	Valid
4	0,712	0,2632	Valid
5	0,666	0,2632	Valid
6	0,494	0,2632	Valid

Sumber : Data Olahan SPSS Versi 26, 2022

Berdasarkan tabel 4.2 sampai dengan 4.5 di atas menunjukkan nilai *person correlation* (r hitung) untuk setiap item pertanyaan lebih besar dari nilai r tabel. Hal ini berarti bahwa semua indikator atau item pertanyaan yang mengukur variabel-variabel tersebut adalah valid.

b. Uji Reliabilitas

Pengujian ini dilakukan untuk melihat seberapa jauh hasil penelitian dapat dipercaya. Pengujian ini menggunakan koefisien *cronbach alpha*. Menurut Indriantoro dan Supomo (2016) menyatakan bahwa suatu variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai *cronbach alpha* lebih dari 0,60. Berikut ini hasil uji reliabilitas dari penelitian ini.

Tabel 4.6
Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach's Alpha	Nilai Standard	Keterangan
Pengendalian Internal (X ₁)	0,785	0,600	Reliabel
Akuntabilitas (X ₂)	0,842	0,600	Reliabel
Transparansi (X ₃)	0,812	0,600	Reliabel
Kinerja Pemerintah (Y)	0,765	0,600	Reliabel

Sumber : Data Olahan SPSS Versi 26, 2022

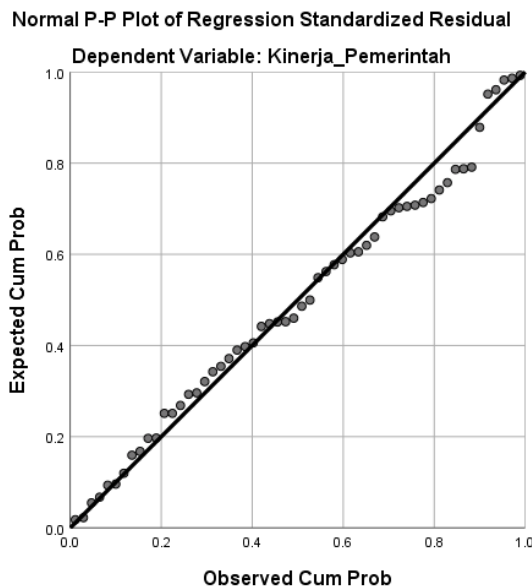
Berdasarkan tabel 4.6 diatas, menunjukkan variabel-variabel tersebut dapat dikatakan reliabel karena memiliki nilai > 0,600 (nilai standar).

3. Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

Uji yang pertama dilakukan dalam uji asumsi klasik adalah uji normalitas. Uji ini bertujuan untuk menghindari terjadinya bias dan melihat apakah model regresi yang digunakan sudah baik, data yang digunakan sebaiknya berdistribusi normal. Terdapat dua cara yang dapat digunakan untuk menguji normalitas data, yaitu dengan menggunakan Normal P-Plot dan yang kedua adalah dengan alat uji Analisis-Kolmogorov Smirnov. Distribusi data penelitian yang normal terlihat dari grafik chart *Normal Probability Plot (P-P Plot)* yang menunjukkan bahwa titik-titik mendekati garis diagonal dan tidak melenceng ke kanan dan ke kiri. Sedangkan hasil uji *Kolmogorov Smirnov* yang menunjukkan bahwa data berdistribusi normal dengan syarat memenuhi nilai sig yang lebih besar daripada 0,05, maka model penelitian ini memenuhi uji asumsi klasik normalitas. Berikut ini hasil uji normalitas dengan Normal P-P Plot pada penelitian ini.

Gambar 4.1
Hasil Uji Normalitas dengan Normal P-P Plot



Sumber : Data Olahan SPSS Versi 26, 2022

Berdasarkan Gambar 4.1 dapat dilihat grafik chart *Normal Probability Plot (P-P Plot)* menunjukkan bahwa titik-titik mendekati garis diagonal dan tidak melenceng ke kanan dan ke kiri. Sehingga dapat disimpulkan bahwa distribusi data penelitian adalah normal.

Tabel 4.7
Hasil Uji Normalitas
dengan Alat Uji Analisis-Kolmogorov Smirnov
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		56
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	1.88021813
Most Extreme Differences	Absolute	.095
	Positive	.095
	Negative	-.049
Test Statistic		.095
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

Sumber : *Data Olahan SPSS Versi 26, 2022*

Berdasarkan tabel 4.7 di atas, hasil uji *Kolmogorov Smirnov* menunjukkan bahwa data berdistribusi normal. Hal ini dikarenakan nilai sig = 0,200 sehingga > 0,05, maka model penelitian ini memenuhi uji asumsi klasik normalitas.

b. Uji Multikolinieritas

Tabel 4.8
Hasil Uji Multikolinieritas
Coefficients^a

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	(Constant)		
	Akuntabilitas	.840	1.190
	Pengendalian Internal	.920	1.088
	Transparansi	.909	1.100

a. Dependent Variable: Kinerja_Pemerintah

Sumber : *Data Olahan SPSS Versi 26, 2022*

Berdasarkan tabel 4.8 diatas, dapat dilihat bahwa nilai *tolerance* dari semua variabel independen lebih besar dari 0,10 (*tolerance* > 0,10) dan nilai *vif* (*variance inflation factor*) lebih kecil dari 10,00 (*vif*<10,00). nilai *tolerance* dari pengendalian internal sebesar (0,920), akuntabilitas sebesar (0,840), dan Transparansi sebesar (0,909). Sedangkan nilai VIF dari pengendalian internal sebesar (1,008), akuntabilitas sebesar (1,190), dan transparansi sebesar (1,100). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat multikolinieritas dalam penelitian ini.

c. Uji Heterokedastisitas

Uji heterokedastisitas dapat diuji dengan dua cara berikut, yang pertama yaitu dengan uji glejer.

Tabel 4.9
Hasil Uji Heterokedastisitas dengan Uji Glejser
Coefficients^a

Model		T	Sig.
1	(Constant)	.500	.619
	Akuntabilitas	1.599	.116
	Pengendalian Internal	-1.105	.274
	Transparansi	-1.074	.288

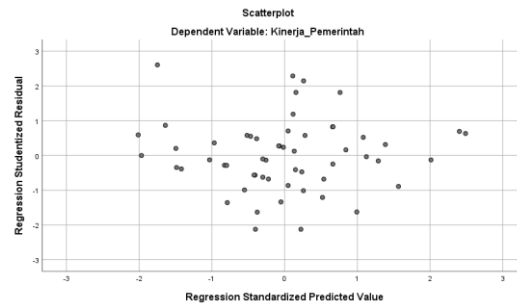
a. Dependent Variable: Abs_Res

Sumber : *Data Olahan SPSS Versi 26, 2022*

Melasari-Roslina-Silvionita, Pengaruh Pengendalian Internal, Akuntabilitas Dan Transparansi Terhadap Kinerja Pemerintah Pada OPD Kabupaten Indragiri Hilir

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa apabila nilai signifikansi (Sig.) > 0,05 maka tidak terjadi heterokedastisitas. Variabel pengendalian internal dengan nilai sebesar 0,274 > 0,05, akuntabilitas memiliki nilai signifikansi sebesar 0,116 > 0,05, dan yang terakhir transparansi dengan nilai sebesar 0,288 > 0,05. Adapun cara lainnya yaitu dengan melihat grafik *Scatterplot* uji heterokedastisitas.

Gambar 4.2
Grafik Scatterplot Uji Heterokedastisitas



Sumber : *Data Olahan SPSS Versi 26, 2022*

Berdasarkan gambar 4.2, dapat dilihat bahwa titik-titik menyebar secara acak baik diatas maupun dibawah 0 pada sumbu Y, dan tidak membentuk suatu pola tertentu, sehingga tidak terdapat gejala heterokedastisitas dalam model regresi penelitian ini dan data dapat dilanjutkan untuk uji berikutnya.

4. Uji Hipotesa

a. Uji Analisis Regresi Linier Berganda

Tabel 4.10
Hasil Uji Regresi Berganda
Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	4.688	4.163		1.126	.265
	Pengendalian_Internal	.123	.052	.278	2.343	.023
	Akuntabilitas	.234	.096	.301	2.431	.019
	Transparansi	.133	.065	.245	2.059	.045

a. Dependent Variable: Kinerja_Pemerintah

Sumber : *Data Olahan SPSS Versi 26, 2022*

Berdasarkan tabel 4.10 terkait uji regresi berganda diatas, maka diperoleh persamaan regresi linier berganda sebagai berikut:

$$Y = 4,688 + 0,234 X_1 + 0,123 X_2 + 0,133 X_3 + \epsilon$$

b. Uji Parsial (Uji T)

Tabel 4.11
Hasil Uji Parsial (Uji T)
Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	4.688	4.163		1.126	.265
	Pengendalian_Internal	.123	.052	.278	2.343	.023
	Akuntabilitas	.234	.096	.301	2.431	.019
	Transparansi	.133	.065	.245	2.059	.045

a. Dependent Variable: Kinerja_Pemerintah

Sumber : *Data Olahan SPSS Versi 26, 2022*

Melasari-Roslina-Silvionita, Pengaruh Pengendalian Internal, Akuntabilitas Dan Transparansi Terhadap Kinerja Pemerintah Pada OPD Kabupaten Indragiri Hilir

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa variabel pengendalian internal, akuntabilitas dan transparansi secara parsial atau individu berpengaruh terhadap kinerja pemerintah pada OPD Kabupaten Indragiri Hilir yang artinya H_1 , H_2 , dan H_3 diterima.

c. Uji Simultan (Uji F)

Tabel 4.12
Hasil Uji Simultan (Uji F)
ANOVA^a

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	95.116	3	31.705	8.479	.000 ^b
	Residual	194.437	52	3.739		
	Total	289.554	55			

a. Dependent Variable: Kinerja_Pemerintah

b. Predictors: (Constant), Transparansi, Pengendalian_Internal, Akuntabilitas

Sumber : *Data Olahan SPSS Versi 26, 2022*

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa variabel akuntabilitas, pengendalian internal, dan transparansi secara simultan atau bersama-sama berpengaruh terhadap kinerja pemerintah pada OPD Kabupaten Indragiri Hilir yang artinya H_4 diterima.

d. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Tabel 4.13
Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)
Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.737 ^a	.543	.516	1.241	1.616

a. Predictors: (Constant), Transparansi, Pengendalian_Internal, Akuntabilitas

b. Dependent Variable: Kinerja_Pemerintah

Sumber : *Data Olahan SPSS Versi 26, 2022*

Berdasarkan tabel 4.13 diatas menunjukkan hasil bahwa nilai *Adjusted R Square* sebesar 0,516 artinya adalah bahwa terdapat sebanyak 51,6% pengaruh variabel kinerja pemerintah dipengaruhi oleh akuntabilitas, pengendalian internal, dan transparansi. Sedangkan sisanya sebesar 48,4% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan atau diteliti dalam penelitian ini.

4.2 Pembahasan

1. Pengaruh Pengendalian Internal terhadap Kinerja Pemerintah pada OPD Kabupaten Indragiri Hilir

Berdasarkan hasil pengujian hipotesa diatas, secara parsial pengendalian internal berpengaruh terhadap kinerja pemerintah pada OPD Kabupaten Indragiri Hilir. maka H_1 diterima. Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik pengendalian internal maka semakin baik kinerja pemerintah. Hasil dari penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Amirudin, Dhanny, dan Rafika (2019) dimana hasil penelitian mengidentifikasi sistem pengendalian internal berpengaruh signifikan terhadap kinerja instansi pemerintah, sedangkan sistem informasi akuntansi berpengaruh tidak signifikan terhadap kinerja instansi pemerintah Kota Samarinda. Adapun sistem informasi akuntansi dan sistem pengendalian internal terhadap kinerja instansi pemerintah secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja instansi.

2. Pengaruh Akuntabilitas terhadap Kinerja Pemerintah pada OPD Kabupaten Indragiri Hilir

Berdasarkan hasil pengujian hipotesa diatas, secara parsial akuntabilitas berpengaruh terhadap kinerja pemerintah pada OPD Kabupaten Indragiri Hilir. maka H_2 diterima. Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik akuntabilitas maka semakin baik kinerja pemerintah. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan t_{hitung} yang lebih besar dari nilai t_{tabel} . Hasil dari penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Jatmiko (2020) dimana hasil penelitian mengidentifikasi bahwa pengawasan internal, akuntabilitas dan transparansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pemerintah.

3. Pengaruh Transparansi terhadap Kinerja Pemerintah pada OPD Kabupaten Indragiri Hilir

Berdasarkan hasil pengujian hipotesa diatas, secara parsial transparansi berpengaruh terhadap kinerja pemerintah pada OPD Kabupaten Indragiri Hilir. maka H_3 diterima. Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik transparansi maka semakin baik kinerja pemerintah. Hasil dari penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Damayanti dan Hermanto (2018) dimana hasil penelitian mengidentifikasi bahwa akuntabilitas, transparansi, dan pengendalian internal berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah.

4. Pengaruh Akuntabilitas, Pengendalian Internal, dan Transparansi terhadap Kinerja Pemerintah pada OPD Kabupaten Indragiri Hilir

Berdasarkan hasil pengujian hipotesa secara simultan pengendalian internal, akuntabilitas dan transparansi secara bersama-sama berpengaruh secara simultan terhadap kinerja pemerintah pada OPD Kabupaten Indragiri Hilir yang artinya H_4 diterima. Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik kemampuan pelaporan akuntabilitas, semakin baik pengendalian internal, serta semakin tinggi tingkat transparansi, maka semakin baik pula kinerja pemerintah. Hasil dari penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Elkha (2020) dimana hasil penelitian mengidentifikasi bahwa pengendalian internal, akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

1. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengendalian internal berpengaruh terhadap kinerja pemerintah, akuntabilitas berpengaruh terhadap kinerja pemerintah serta transparansi berpengaruh terhadap kinerja pemerintah. hasil uji simultan menunjukkan bahwa pengendalian internal, akuntabilitas dan transparansi berpengaruh terhadap kinerja pemerintah pada OPD Kabupaten Indragiri Hilir..
2. Uji koefisien determinasi nilai *Adjusted R Square* sebesar 0,516 artinya adalah bahwa atau dalam bentuk persen terdapat sebanyak 51,6% pengaruh variabel kinerja pemerintah dipengaruhi oleh akuntabilitas, pengendalian internal, dan transparansi. Sedangkan sisanya sebanyak 0,484 atau 48,4% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

5.2 Saran

1. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan untuk dapat menambah variabel-variabel lain yang dapat mempengaruhi Kinerja Pemerintah, misalnya pengawasan fungsional, peningkatan pelayanan publik, dan lain sebagainya.
2. Bagi pimpinan atau Bupati harus lebih memperhatikan OPD yang bertempat di Kabupaten Indragiri Hilir, agar dapat menyelesaikan pekerjaan dengan baik dan sesuai dengan yang diharapkan oleh masyarakat.
3. Bagi akademisi untuk lebih memahami aspek-aspek yang berkaitan dengan bagaimana menunjang kinerja pemerintah khususnya Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir.

DAFTAR PUSTAKA

- Aliyah, S., & Nahar, A. (2012). Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah Dan Aksesibilitas laporan Keuangan Daerah Terhadap Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Jepara. *Jurnal Akuntansi & Auditing*, 8(2), 137–150.
- Amri, Aprini Aulia. (2019). *Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Pengendalian Intern terhadap Kinerja Instansi Pemerintah pada Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bulukumba [skripsi]*. Makassar: Universitas Muhammadiyah Makassar.
- Amirudin, Omar Dhanny, Rafika. (2019). Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi Berbasis Komputer dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah Kota Samarinda (Studi Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Samarinda). *Jurnal Eksis*, Vol. 15, No. 1.
- COSO. (2013). *Internal Control – Integrated Framework: Executive Summary*, Durham, North California.
- Damayanti, Evi., dan Suwardi Bambang Hermanto. (2018). Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi dan Pengendalian Internal Terhadap Kinerja Pemerintah. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, Vol. 7, No. 3.
- Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara. (2012). *Sistem Pengendalian Internal Badan Usaha Milik Negara*. Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.
- Elkha, Fatimah., dan Wahidahwati. (2020). Pengaruh Pengendalian Internal, Akuntabilitas, dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*. Volume 9, Nomor 3.

Melasari-Rosliana-Silvionita, *Pengaruh Pengendalian Internal, Akuntabilitas Dan Transparansi Terhadap Kinerja Pemerintah Pada OPD Kabupaten Indragiri Hilir*

- Emzir. (2010). *Metodologi Penelitian Pendidikan Kuantitatif & Kualitatif*. Depok: Raja Grafindo Persada.
- Haris, A., Ratih R., Asrini. (2022). Analisis Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi dan Sistem Pengendalian Intern terhadap Kinerja Pemerintah Daerah (Study Empiris pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Provinsi Jambi). *Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis*, 13(1)
- Indiantoro dan Supomo. (2016). *Metodologi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi dan Manajemen*. Yogyakarta: BPFE.
- Jannah, M. (2016). *Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintah, Sistem Pengendalian Internal, dan Peran Sarana Prasarana Pendukung terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada Instansi Pemerintah Kabupaten Gunung Kidul) [skripsi]*. Yogyakarta: Universitas Muhammadiyah.
- Jatmiko, Bambang. (2020). Pengaruh Pengawasan Internal, Akuntabilitas dan Transparansi terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman. *Jurnal Akuntansi Trisakti, Volume 7, Nomor 2*.
- Key, A. (2017). Stewardship Theory : Is Board Accountability Necessary? *International Journal of Law and Management*, 59 (6)
- Putra, D. D., Cornelius R., Ferry D. 2021. Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas Dan Pengendalian Intern Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah Pada Dinas Perdagangan Kota Samarinda. *Jurnal Ilmu Akuntansi Mulawarman (JIAM), Vol. 7 (1)*
- Raba, Manggaukang (2020). *Akuntabilitas Konsep dan Implementasi*. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang.
- Republik Indonesia. 2008. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
- Republik Indonesia. 2014. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- Rusdiana, A., dan Nasihudin. (2018). *Akuntabilitas Kinerja Penelitian*. Bandung: UIN SGB Bandung.
- Saputra, D. S., Darwanis, & Abdullah, S. (2014). Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas dan Komitmen Organisasi Terhadap Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Studi pada Pemda Kabupaten Aceh Selatan). *Jurnal Akuntansi Program Pascasarjana Universitas Syiah Kuala*, 3(2), 76–84
- Sumartono dan Muhammad R. P. (2019). The Factors Of Financial Report Transparency In The Regional Government. *Journal of Contemporary Accounting*, 1(1), 11-25
- Sumanto, Rifky. (2021). *Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi terhadap Kinerja Pengelolaan Anggaran [skripsi]*. Jambi: Universitas Jambi.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Bisnis Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Temalagi, Selva., Fanny M. A., Meni D. S. (2022) The Effect Of Accountability, Transparency And Internal Control On Value For Money-Based Budget Performance. *3rd International Seminar on Accounting Society*
- Badan Pemeriksa Keuangan perwakilan Provinsi Riau. Melalui <<https://riau.bpk.go.id>> [Di akses tgl 5 Oktober 2021](#)
- Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Melalui <<http://www.goodgovernance-bappenas.go.id>> [Di akses tgl 5 Januari 2022](#)